

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan organisasi sektor publik, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah, laporan keuangan yang disajikan harus diperhatikan dan merupakan sebuah media bagi entitas (pemerintah) untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki yaitu relevan, andal (reliability), dapat dipahami (understandability), dan dapat dibandingkan (comparability). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam membuat keputusan. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal maupun internal lembaga/instansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis (Krismiaji 2015).

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap

kinerjanya (Mangkunegara 2014). Penugasan penting Presiden Republik Indonesia kepada Kapolri yaitu untuk menekankan pengembangan karir dan SDM Polri secara progresif. Sehingga kompetensi personel diseluruh lini bisa berkembang dengan baik. Kompetensi sebaiknya menjadi kata kunci bagi Kapolri dalam menyempurnakan organisasi. Istilah kompetensi dalam kamus bahasa Inggris Webster mendefinisikan *competence* sebagai kondisi yang cocok, cukup dan tepat (*suitable, sufficient and fit*).

Faktor pendukung lain yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

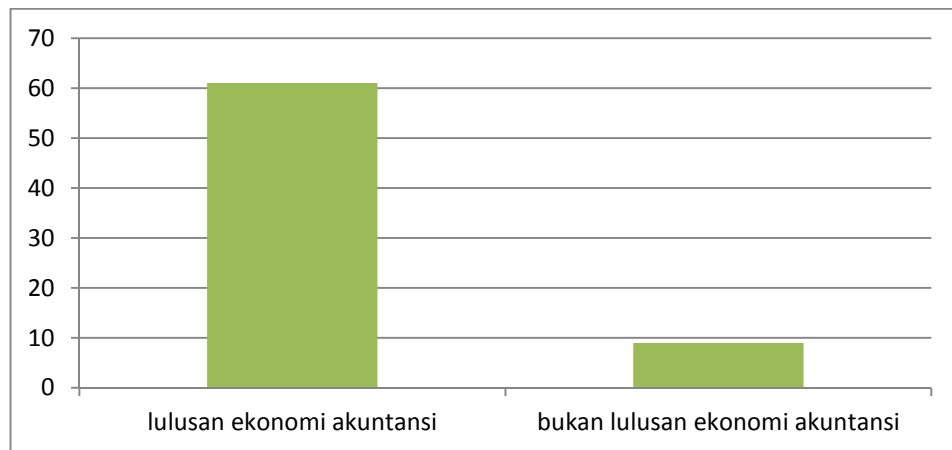
Pemeriksaan atas laporan keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Badan Pemeriksaan Keuangan adalah memberikan opini atas penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang ditetapkan dengan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No 01 Tahun 2017. Tabel 1.1 Menunjukkan hasil audit Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama 5 tahun.

Tabel 1.1
Hasil Audit BPK

Tahun	Opini
2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber : Hasil Audit BPK 2019

Berdasar data diatas, maka hasil dari pengelolaan dan pelaporan keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat baik selama 5 tahun berturut-turut. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam pelaporan keuangan, maka Polri dituntut untuk selalu profesional. Hal ini didasarkan pada hasil laporan audit BPK seperti tabel di atas, yang artinya ada tuntutan untuk masa kini dan yang akan datang agar selalu mendapatkan hasil yang optimal dalam setiap pelaporan keuangannya.



Sumber : data primer yang diolah 2021

Gambar 1.1
Latar Belakang Pendidikan Staf Keuangan
Kepolisian Resor di Wilayah Jawa Tengah

Berdasar hasil gambar 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa latar belakang pendidikan staf bagian keuangan lulusan ekonomi akuntansi sebesar 13 % sedangkan bukan lulusan ekonomi akuntansi sebesar 87 %. Hal ini dapat dikaitkan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa walaupun yang mengelola laporan keuangan bukan dari lulusan ekonomi akuntansi, bagian keuangan dapat menyajikan laporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun keahlian yang sebenarnya ini mencakup *technical skill*, *human skill*, *conceptual skill*, kecakapan untuk memanfaatkan kesempatan serta kecermatan penggunaan peralatan yang dimiliki organisasi dalam mencapai tujuan.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah mencakup 35 Satuan Kerja Wilayah. Kepala Satuan Kerja Wilayah yaitu Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bertanggung jawab langsung dibawah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Kepolisian Daerah Jawa Tengah selaku Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dalam menjalankan proses akuntansi dan belanja demi merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan. Beberapa masalah yang sering muncul yaitu anggaran yang sulit terealisasi sehingga kinerja masih perlu dievaluasi, sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung menghambat pengelolaan keuangan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pengelolaan keuangan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2011 bab II Pasal 4 tentang Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mahardini and Miranti 2018) dan (Andi 2017) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Mahardini and Miranti 2018), (Andi 2017), dan (Biana and Martingingsih 2016) menggunakan variable yang sama yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, tetapi pada penelitian milik (Biana and Martingingsih 2016) memiliki hasil yang berbeda yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini disebabkan karena penerapan standar akuntansi pemerintahan masih belum maksimal dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Tawaqal & Suparno 2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Septarini & Papilaya 2016) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Tawaqal & Suparno 2017) yaitu dengan menambah variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan perbedaan pada objek penelitian yang diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.

Berdasar uraian tersebut di atas menunjukkan research gap dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu:

Tabel 1.2.
Research Gap

Variabel Dependen	Variabel Independen	Pengaruh	Nama Peneliti	Judul Penelitian
Kualitas Laporan Keuangan	Standar Akuntansi Pemerintahan	Positif	(Mahardini & Miranti 2018) , (Andi 2017)	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten
		Negatif	(Biana & Martingingsih 2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Universitas Mataram.
	Sistem Informasi Akuntansi	Positif	(Tawaqal and Suparno 2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
		Negatif	(Septarini & Papilaya 2016)	Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Positif	(Wardani & Andriyani 2016)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten
		Negatif	(Putri, Ismi Desintha & Sri Rahayu 2018)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akural, Sistem Pengendalian Internal, Dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
	Sistem Pengendalian Internal	Positif	(Rahmawati, Mustika, & Eka 2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Tangerang Selatan
		Negatif	(Septarini & Papilaya 2016)	Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Penggabungan jurnal-jurnal

Tabel di atas menunjukkan perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang beragam, dimana faktor-faktor yang diteliti terkait dengan kualitas laporan keuangan meliputi penerapan standar akuntansi, sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia serta sistem pengendalian internal. Adapun objek penelitian sesuai dengan fenomena penelitian yaitu pada Instansi Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian yang diajukan adalah: **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah objek penelitian hanya pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang mencakup 35 Satuan Kerja Wilayah.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan Menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah
2. Menguji dan Menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
3. Menguji dan Menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
4. Menguji dan Menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yaitu sebagai bahan evaluasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan mengenai pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Bagi penulis, yaitu untuk menambah pengetahuan tentang Kualitas Laporan Keuangan Kepolisihan Daerah Jawa Tengah dan wawasan penulis dalam menerapkan beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan
3. Bagi akademik, yaitu memberi gambaran langsung tentang Kualitas Laporan Keuangan pada Kepolisihan Daerah Jawa Tengah.

1.5. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu pengertian pengertian Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Isi dari bab metodologi penelitian menjelaskan dan memaparkan metode-metode apa yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi yang meliputi data yang dibutuhkan, jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab gambaran umum lokasi penelitian menjelaskan tentang sejarah, struktur organisasi, *job description*, produk yang dihasilkan, dan sumber daya yang berkaitan dengan masalah penelitian

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan menjelaskan tentang deskripsi data penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup berisi tentang kesimpulan atas pembahasan masalah serta saran

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. 2017. "Sistem Informasi Akuntansi Esensi & Aplikasi (TMBooks, Ed.)" eds. Sistem Informasi Akuntansi Esensi and Aplikasi.
- Bastian, Indra. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Biana, M.Ali Fikri Biana, and Sri Pancawati Martingingsih. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. Universitas Mataram.
- Daud, Rochmawati, and Valeria Mimosa Windana. 2014. "Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Berbasis Komputer Pada Perusahaan Kecil (Studi Kasus Pada PT." *Trust Technology*). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya (JMBS* 12(1).
- Faristina, Rosalin. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi Pada BLU Di Kota Semarang.Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang."
- Ghozali. 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 25." *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun* 6(2).
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Keempat*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahardini, Nikke Yusnita, and Ade Miranti. 2018. "Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015." *Jurnal Akuntansi* 5(1).
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putri, Ismi Desintha Sri Rahayu, & Annisa Nurbaiti. 2018. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akural, Sistem Pengendalian Internal, Dan Penerapan Sistem Manjamene Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan."
- Rahmawati, Astika, I.Wayan Mustika, and Lilik Handaya Eka. 2018. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd

- Kota Tangerang Selatan.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 20(mor 2): 8–17.
- Rai, I.Gusti Agung. 2011. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sako, Umar, and Felmi D Lantowa. 2018. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.” *Journal Of Accounting Science* 2(1).
- Septarini, Dina Fitri, and Frans Papilaya. 2016. “Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* VII(2): 100–116.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Statistik*. Jakarta: Alfabeta.
- Tawaqal, Irzal, and Suparno. 2017. “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” *Jurnal JIMEKA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah Kuala* 2(4).
- Wardani, Dewi Kusuma, and Ika Andriyani. 2016. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten.” *Jurnal Akuntansi* 5(2).